

EFISIENSI PENGGUNAAN DANA OTONOMI KHUSUS PROVINSI

ACEH PERIODE 2018-2021



TESIS

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SALAH SATU SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER
DALAM ILMU EKONOMI**

Disusun Oleh:

Miftahul Jannah

NIM. 20208012025

**PROGRAM STUDI MAGISTER EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

EFISIENSI PENGGUNAAN DANA OTONOMI KHUSUS PROVINSI

ACEH PERIODE 2018-2021



TESIS

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SALAH SATU SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER
DALAM ILMU EKONOMI**

Disusun Oleh:

Miftahul Jannah

NIM. 20208012025

Dosen Pembimbing:

Dr. Muhammad Ghafur Wibowo, S.E., M.Sc

NIP. 19800402 200312 1 003

**PROGRAM STUDI MAGISTER EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 550821, 512474 Fax. (0274) 586117 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-115/Un.02/DEB/PP.00.9/01/2023

Tugas Akhir dengan judul : EFISIENSI PENGGUNAAN DANA OTONOMI KHUSUS PROVINSI ACEH
PERIODE 2018-2021

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MIFTAHUL JANNAH, S.E
Nomor Induk Mahasiswa : 20208012025
Telah diujikan pada : Kamis, 05 Januari 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Muhammad Ghafur Wibowo, S.E., M.Sc.
SIGNED

Valid ID: 63c77d33824d5



Penguji I

Dr. Taosige Wau, S.E., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 63c764453cba3



Penguji II

Dr. Miftakhul Choiri, S.Sos.I., M.S.I.
SIGNED

Valid ID: 63bde76829d59



Yogyakarta, 05 Januari 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Dr. Afdawaiza, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 63c8a5028d2df

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudari Miftahul Jannah

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Miftahul Jannah

NIM : 20208012025

Judul Tesis : EFISIENSI PENGGUNAAN DANA OTONOMI KHUSUS

PROVINSI ACEH PERIODE 2018-2021

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam program studi Magister Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar magister dalam Ilmu Ekonomi Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar Tesis saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 5 Desember 2022

Pembimbing,



Dr. Muhammad Ghafur Wibowo, S.E., M.Sc

19800314 200312 1 003

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Miftahul Jannah
NIM : 20208012026
Jurusan Program Studi : Magister Ekonomi Syariah

Menyatakan tesis yang berjudul **“Efisiensi Penggunaan Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh Periode 2018-2021”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau sanduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebutkan dalam karya ini, maka tanggung jawab semuanya ada pada penyusun.

Demiikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Yogyakarta, 5 Desember 2022

Hormat saya,



Miftahul Jannah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS

AKHIR

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Miftahul Jannah
NIM : 20208012025
Program Studi : Magister Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, karya ilmiah saya berjudul:

“Efisiensi Penggunaan Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh Periode 2018-2021”.

Dengan ini menyatakan bahwa sanggup untuk menerbitkan Tesis ke dalam jurnal yang tersitasi Standar DOAJ (*Directory of Open Access Journal*), guna memenuhi salah satu syarat Ujian Tugas Akhir/Tesis di Program Studi Magister Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 5 Desember 2022

Penulis



Miftahul Jannah

HALAMAN MOTTO

المستحيل صخرة صلبة تنكسر تحت ضربات العزيمة

***“Mustahil adalah batu keras yang dapat hancur oleh pukulan-
pukulan tekad bulat”.***



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya

Ayahanda Drs. Ishak dan Ibunda Nurhayati, S.E,

Malaikat tak bersayap dan sang motivator dalam hidup saya, yang penuh pengorbanan, kesabaran serta tak pernah jemu untuk mendoakan dan menyayangi sampai saat ini



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža'	ž	Zet (dengan titik di bawah)

ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

حَاعِدَّة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
حَاعِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah

Semua ta' marbutah ditulis dengan h, baik berada pada kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang "al"). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حِكْمَة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
عِلْمَة	Ditulis	<i>'illah</i>

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>Karamah al auliya'</i>
---------------	---------	---------------------------

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

--- َ ---	Fathah	Ditulis	A
--- ِ ---	Kasrah	Ditulis	I
--- ُ ---	Dammah	Ditulis	U
نعل	Fathah	Ditulis	<i>Fa'ala</i>
ذكر	Kasrah	Ditulis	<i>Zukira</i>
يذهب	Dammah	Ditulis	<i>Yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. Fathah + alif	Ditulis	A
جاهل َّ	Ditulis	<i>Jahiliyyah</i>
2. Fathah + ya' mati	Ditulis	A
تانسى	Ditulis	<i>Tansa</i>
3. Kasrah + ya' mati	Ditulis	I
كريم	Ditulis	<i>Karim</i>
4. Dhammah + wawu mati	Ditulis	U
فروض	Ditulis	<i>Furud</i>

F. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2. Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang Berurutan dalam Satu Kata yang Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أَعَدَّتْ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لَيْسَ شَرِكْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* maka ditulis menggunakan huruf awal “al”

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Quran</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* maka ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السَّمَاءِ	Ditulis	<i>As-sama'</i>
الْأَشْهُبِ	Ditulis	<i>Asy-syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Zawi al-furud</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *rabbil'alam*, dengan menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh Periode 2018-2021” sholawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya.

Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai derajat Magister Strata 2 Program Studi Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusunan tesis ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, penyusun ingin menyampaikan terimakasih yang dalam kepada pihak-pihak yang telah membantu penulisan dalam menyelesaikan tesis ini, pihak-pihak tersebut adalah:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Dr. Afdawaiza, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Dr. Muhammad Ghafur Wibowo, S.E., M.Sc. selaku ketua Prodi Magister Ekonomi Syariah dan Dosen Pembimbing Tesis yang senantiasa sabar mengarahkan dan membimbing penulis dari awal hingga akhir penulisan Tesis ini

4. Bapak Dr. Joko Setyono, S.E., M.Si., selaku wakil Prodi Magister Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
5. Bapak DR. Mukhamad Yazid Afandi, M.Ag., selaku dosen penasehat akademik selama 2 tahun di Magister Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu atau wawasan serta pengalaman pengetahuannya kepada penulis selama perkuliahan.
7. Ibu Herin Ratnaningsih, S.Pd., M.Pd.B.I. Selaku Kepala Sub Bagian Akademik. Kemahasiswaan Magister Ekonomi Syariah yang senantiasa sabar dalam membantu mahasiswa yang kesulitan selama akademik berlangsung.
8. Seluruh pegawai dan staf Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
9. Teruntuk Orang Tua, Bapak Drs. Ishak dan Ibu Nurhayati yang senantiasa mendoakan, memberi semangat, motivasi mendidik dengan penuh kesabaran dan selalu memberikan arahan untuk menjadikan saya orang yang bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat.
10. Abang tercinta Alkhalilul Azmi, S.H dan Almarhumah Maryam selaku nenek yang selalu mendengarkan keluh kesah serta teman diskusi dalam menyelesaikan pendidikan Magister.
11. Saudara M. Rangga Mulya Rizki, yang senantiasa menemani, membantu dan memberikan motivasi dalam perjalanan penyelesaian studi Magister

12. Tim Yoga, Hani, Nada dan Mbak Ica, yang menjadi teman cerita, teman belajar, juga yang selalu memberikan motivasi selama perkuliahan hingga menyelesaikan penulisan Tesis.
13. Seluruh teman-teman Prodi Magister Ekonomi Syariah Angkatan 2020.

Penyusun menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Namun dengan kerendahan hati penyusun berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi pembacanya. *Amin Ya Rabbal Alamin.*

Yogyakarta, 5 Desember 2022
Peneliti,



Miftahul Jannah



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

EFISIENSI PENGGUNAAN DANA OTONOMI KHUSUS PROVINSI ACEH PERIODE 2018-2021	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR ..	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
LAMPIRAN	xix
ABSTRAK	xx
<i>ABSTRACT</i>	xxi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Sistematika Pembahasan	10
BAB II	12
LANDASAN TEORI	12
A. Desentralisasi Fiskal	12
B. Dana Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	13
C. Dana Otonomi Khusus	15
D. Kesejahteraan Masyarakat	22
E. Efisiensi	27

F. Telaah Pustaka	30
G. Kerangka Pemikiran	34
BAB III.....	38
METODE PENELITIAN.....	38
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Populasi dan Sampel.....	38
C. Jenis Dan Sumber Data.....	39
D. Definisi Operasional Variabel.....	39
E. Metode Analisis Data	43
BAB IV	49
HASIL DAN PEMBAHASAN	49
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	49
B. Dana Otonomi Khusus.....	52
C. Hasil.....	55
D. Pembahasan.....	84
BAB V.....	107
PENUTUP	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA.....	109
LAMPIRAN	cxv

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persentase Penduduk Miskin Provinsi Aceh tahun 2017-2021	5
Tabel 2.1 Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Aceh (APBA)..	14
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel.....	40
Tabel 4.1 Nama Ibukota dan Luas Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh ...	50
Tabel 4.2 Penerimaan DOKA Tahun Anggaran 2008-2021	53
Tabel 4.3 Alokasi DOKA Per Bidang Berdasarkan UU no. 11/2006 dan Qanun No.2/2008.....	54
Tabel 4.4 Nilai Efisiensi DOKA bidang infrastruktur 2018-2021	56
Tabel 4.5 Nilai Efisiensi DOKA bidang Pemberdayaan Ekonomi Rakyat 2018-2021.....	57
Tabel 4.6 Nilai Efisiensi DOKA Bidang Pendidikan 2018-2021.....	58
Tabel 4.7 Nilai Efisiensi DOKA Bidang Kesehatan 2018-2021	60
Tabel 4.8 <i>Reference Frequencies</i> Bidang Infrastruktur	62
Tabel 4.9 <i>Reference Frequencies</i> Bidang Pemberdayaan Ekonomi Rakyat.....	63
Tabel 4.10 <i>Reference Frequencies</i> DOKA Bidang Pendidikan	63
Tabel 4.11 <i>Reference Frequencies</i> DOKA Bidang Kesehatan	64
Tabel 4.12 <i>Potential Improvement (Input)</i> Infrastruktur	65
Tabel 4.13 <i>Potential Improvement (output)</i> Infrastruktur Tahun 2018	66
Tabel 4.14 <i>Potential Improvement (output)</i> Infrastruktur Tahun 2019	68
Tabel 4.15 <i>Potential Improvement (output)</i> Infrastruktur Tahun 2020	69
Tabel 4.16 <i>Potential Improvement (output)</i> Infrastruktur Tahun 2021	70
Tabel 4.17 <i>Potential Improvement (Input)</i> Pemberdayaan Ekonomi Rakyat	72
Tabel 4.18 <i>Potential Improvement (output)</i> Pemberdayaan Ekonomi Rakyat 2018-2021.....	73
Tabel 4.19 <i>Potential Improvement (Input)</i> Pendidikan.....	75
Tabel 4.20 <i>Potential Improvement (output)</i> Pendidikan Tahun 2018	76
Tabel 4.21 <i>Potential Improvement (output)</i> Pendidikan Tahun 2019	77
Tabel 4.22 <i>Potential Improvement (output)</i> Pendidikan Tahun 2020	79
Tabel 4.23 <i>Potential Improvement (output)</i> Pendidikan Tahun 2021	80
Tabel 4.24 <i>Potential Improvement (Input)</i> Kesehatan.....	81
Tabel 4.25 <i>Potential Improvement (output)</i> Kesehatan 2018-2021.....	82
Tabel 4.26 Realisasi JKA Tahun 2010-2021.....	101

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Alokasi DOKA 2008-2021 (Dalam Triliun Rupiah).....	4
Gambar 1.2 Persentase Masyarakat Miskin Pulau Sumatera 2020-2021	6
Gambar 2.1 Maqasid Syariah dan Ekonomi Islam.....	25
Gambar 2.2 Efisiensi Orientasi Input.....	28
Gambar 2.4 Kerangka Pemikiran.....	37
Gambar 4.1 Peta Provinsi Aceh.....	52
Gambar 4.2 Relevansi DOKA Terhadap Maqasid Syariah	103
Gambar 4.3 Interkoneksi DOKA Dan Prioritas Dimensi <i>Dharuriyyah</i> dengan Dimensi Pemeliharaan Agama	105



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN

Lampiran 1 . Penerimaan Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun 2008-2021	cxv
Lampiran 2. Anggaran dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Aceh	cxvi
Lampiran 3. Variable input dan Output.....	cxxiii
Lampiran 4. Hasil Analisis Menggunakan Metode DEA.....	cxxxvii
Lampiran 5 Surat Izin Penelitian	cxcvi
Lampiran 6 Surat Kuasa	cxcvii
Lampiran 7 Surat Bukti Telah Melakukan Penelitian	cxcviii
Lampiran 8 Curriculum Vitae.....	cxcix



ABSTRAK

Indonesia tidak hanya menerapkan kebijakan desentralisasi untuk seluruh wilayah Indonesia, tetapi juga memperkenalkan desentralisasi asimetris terutama di daerah tertentu seperti Aceh, Papua dan Papua Barat. Kebijakan desentralisasi asimetris ini lebih banyak mengalihkan tanggung jawab ke daerah tertentu, didukung dengan pemberian dana transfer otonomi khusus dari pemerintah pusat. Dana Otonomi Khusus antara lain membiayai program-program pembangunan yang mendorong perekonomian, meningkatkan kualitas hidup, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Aceh. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efisiensi dana otonomi khusus yang diterima provinsi Aceh tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 melalui analisis *Data Envelopment Analysis* (DEA). Data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari publikasi BPS dan BPKA. Hasil uji efisiensi dengan metode DEA menunjukkan bahwa dari 23 Kabupaten/Kota yang diteliti hanya 1 kota yaitu Subulussalam yang sudah efisien dalam mengalokasikan DOKA selama periode 2018-2021. Hal ini disebabkan ketidaktepatan target alokasi DOKA, dan masih banyak permasalahan alokasi.

Kata Kunci: Desentralisasi, Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA), kesejahteraan masyarakat

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

Indonesia has not only implemented a decentralization policy for all of Indonesia's territory but has also introduced asymmetric decentralization, especially in certain areas such as Aceh, Papua and West Papua. This asymmetric decentralization policy shifts more responsibility to specific regions, supported by granting special autonomy transfer funds from the central government. The Special Autonomy Fund, among other things, finances development programs that stimulate the economy, and improve the quality of life, education, health and infrastructure to create people's welfare. Aceh. This study aimed to determine the efficiency of the special autonomy funds received by the province of Aceh from 2018 to 2021 through Data Envelopment Analysis (DEA). The data used is secondary data that comes from the publication of the BPS and BPKA. The DEA method's efficiency test results show that of the 23 regencies/cities studied, only two city have efficiently allocated DOKA for the 2018-2021 period. This is due to the inaccuracy of DOKA's allocation target, and there are still many allocation problems.

Keywords: Decentralization, Autonomy Fund, community welfare



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia mengakui dan menghormati instansi pemerintahan daerah tertentu yang bersifat khusus atau istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18b (1) UUD 1945. Seperti Provinsi Aceh dan daerah lainnya yang mendapatkan hak keistimewaan Daerah Istimewa. Kebebasan berekspresi diberikan dalam rangka demokratis dimana pemerintah daerah merupakan elemen paling dekat dengan rakyat. Pemberian otonomi khusus untuk mempercepat, memajukan dan mengembangkan daerah tersebut.

Aceh merupakan provinsi yang diberikan wewenang khusus untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sesuai dengan kondisi dan wilayah tersebut sebagai wujud dari proses desentralisasi sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Pemberian hak otonomi ini diharapkan mampu melakukan pembangunan dan mengejar ketertinggalannya dari provinsi lain yang lebih maju sehingga terciptanya kesejahteraan masyarakat (Khusaini, 2016).

Peningkatan kesejahteraan masyarakat hanya dapat dicapai jika kemampuan keuangan daerah stabil. Tanpa dukungan finansial, kegiatan pembangunan dan penyediaan pelayanan publik untuk mewujudkan pertumbuhan kesejahteraan rakyat tidak dapat berjalan dengan lancar. Artinya masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan warganya jika pemerintah

daerah juga meningkatkan kemampuannya (Christia & Ispriyarso, 2019).

Pemerintah pusat melakukan inovasi dengan memberlakukan otonomi khusus di daerah Aceh sebagai bentuk jawaban dari tuntutan dan dorongan dari masyarakat Aceh dalam melakukan pembangunan daerah. Pemberian Dana Otonomi Khusus terhadap Provinsi Aceh didasari oleh beberapa faktor, salah satunya Aceh menjadi modal bagi dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia (Sanur, 2020).

Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Aceh diberikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dana Otonomi Khusus merupakan penerimaan Pemerintah Aceh yang ditujukan untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan

Pemberlakuan otonomi khusus telah menjadikan Indonesia sebagai negara dengan sistem tata kelola ekonomi yang terdesentralisasi. Tujuan desentralisasi kebijakan fiskal adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Keterkaitan antara pemerintah pusat dan daerah telah memfasilitasi desentralisasi mendorong terjadinya, dimana negara kini mengalokasikan Dana Perimbangan (DP) untuk membiayai kebutuhan daerah dalam menunjang pelaksanaan pembangunan. Dana transfer dari pusat dinilai sangat penting agar pencapaian standar minimal pelayanan

publik di seluruh tanah air tetap terjamin dan kesenjangan antar daerah berkurang (Maulana *et al.*, 2018).

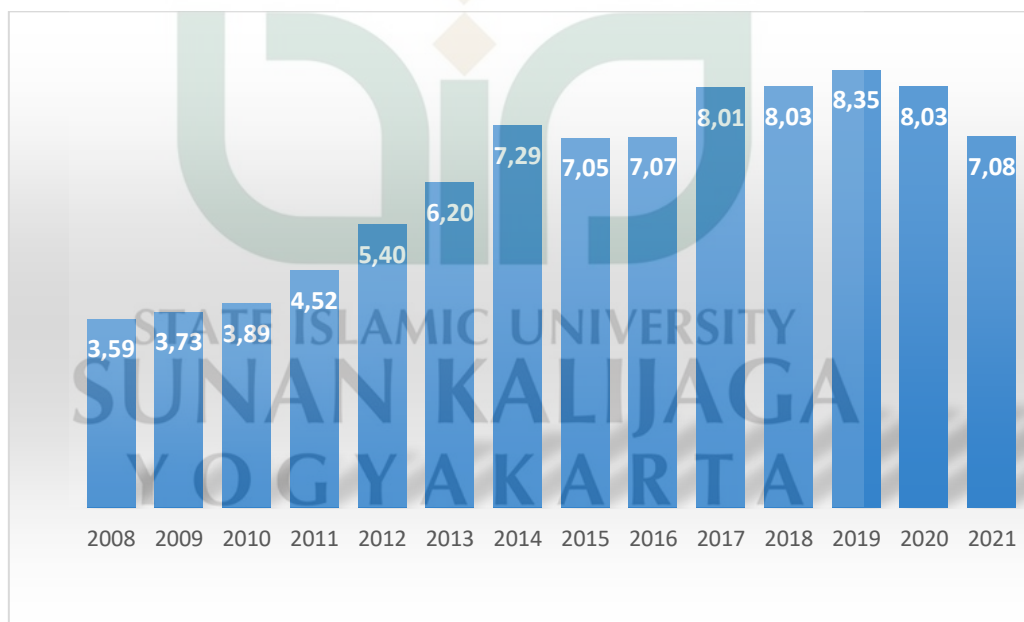
Penerapan desentralisasi fiskal juga bisa menjadi bencana bagi daerah itu sendiri jika tidak diiringi dengan tata kelola yang benar. Pemberlakuan daerah otonom dapat memperkuat kesenjangan dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Hal ini bisa disebabkan oleh jumlah penduduk, potensi masyarakat serta perbedaan tingkat pendapatan dan basis pajak antar daerah (Ben, 2003). Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi yang menerima dana otonomi khusus dari pemerintah pusat yang didedikasikan untuk kesejahteraan rakyat.

Pemberian hak otonomi khusus oleh pemerintah pusat bagi Provinsi Aceh, Papua dan Papua Barat dengan tujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, dalam rangka mengejar ketertinggalan provinsi lain yang lebih maju, pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia, penegakan supremasi dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan (Aziz *et al.*, 2019).

Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) merupakan karunia bagi masyarakat Aceh untuk membantunya pulih dari permasalahan ekonomi yang berkelanjutan. Kemiskinan di Aceh yang masih berlanjut hingga saat ini menjadi atensi masyarakat. Bagaimana tidak, besarnya kucuran dana yang diberikan pemerintah pusat tidak membawa perubahan yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, dana sebesar itu justru menimbulkan masalah baru bagi pembangunan Aceh, yaitu kesenjangan pembangunan. Ternyata, besaran anggaran yang disetujui tidak sesuai dengan reformasi

pembangunan yang mengarah pada pengentasan kemiskinan. (Ramzil *et al.*, 2020).

Dana tersebut ditransfer setiap tahun ke Rekening Kas Daerah Provinsi Aceh, yang menjadi pendapatan dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA). DOKA digunakan untuk mendanai program pembangunan daerah di beberapa sektor seperti pemeliharaan infrastruktur, penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi penduduk, dana pendidikan, dana sosial dan kesehatan (Abrar, 2018). Keberadaan DOKA memiliki peluang besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sejak 2008 hingga 2021, Pemerintah Aceh menerima bantuan DOKA sebesar Rp89,93 triliun, dapat dilihat pada diagram dibawah ini:



Gambar 1.1 Alokasi DOKA 2008-2021 (Dalam Triliun Rupiah)

Sumber: Data Kemenkeu Diolah(2021)

Sejak 2008 hingga 2021, Aceh menerima Rp89,93 triliun dana otsus dari pemerintah pusat. Pada tahun 2021 saja, Provinsi Aceh menerima dana

Otsus dari pusat hingga Rp 7,8 triliun. Meski Aceh sudah mendapat begitu besar kucuran DOKA dari pusat, akan tetapi Aceh masih tercatat sebagai provinsi termiskin di Pulau Sumatera (Redaksi, 2021).

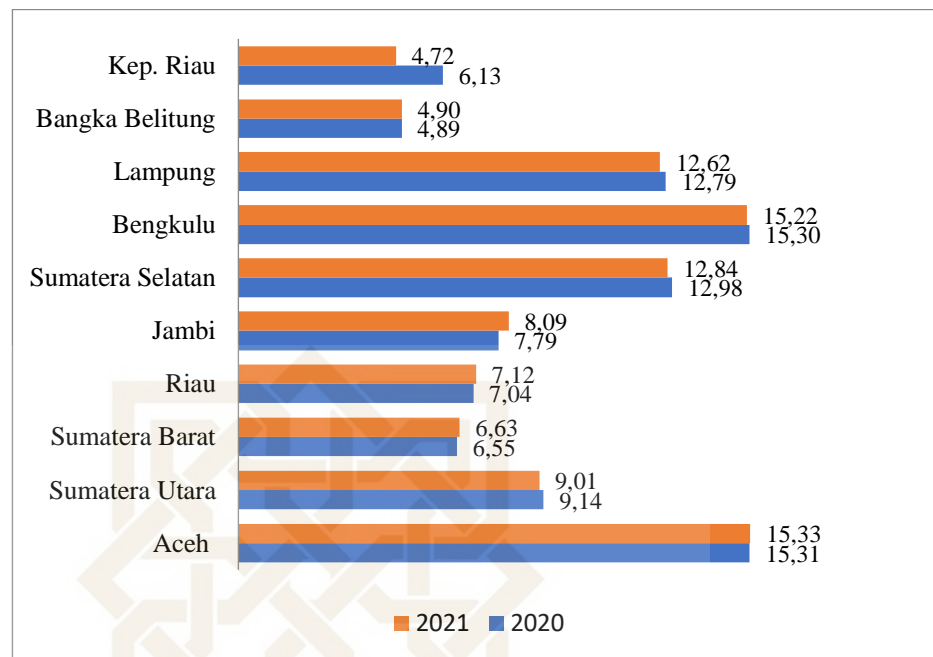
Dana Otonomi Khusus Aceh yang seharusnya dapat mengentaskan kemiskinan pasca konflik bersenjata dan sosial yang berkepanjangan ternyata hanya bisa tampil secara sepihak di tengah masyarakat Aceh. Faktanya, pada 2021 jumlah masyarakat miskin di Aceh mencapai 834,24 ribu orang atau sebesar 15,33% dari total penduduk. Angka ini mengalami kenaikan menjadi sebesar 0,34% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Padahal, berdasarkan data tahunan, jumlah penduduk miskin di Aceh selama lima tahun sempat mengalami penurunan (BPS, 2021).

Tabel 1.1 Persentase Penduduk Miskin Provinsi Aceh tahun 2017-2021

2017	2018	2019	2020	2021
16,89	15,97	15,32	14,99	15,33

Sumber: Data BPS diolah (2022)

Tabel 1.1 menjelaskan bahwa proporsi penduduk miskin di Aceh pada tahun 2017 sebesar 16,83%. Kemudian terus mengalami penurunan hingga menjadi 14,99% pada tahun 2020. Namun Kembali mengalami kenaikan sebesar 0,34% pada tahun 2021 menjadi 15,33%. Meski mengalami penurunan, akan tetapi, kemiskinan di Aceh masih tinggi dibandingkan daerah lain di Sumatera. Hal tersebut dapat dilihat pada diagram berikut (BPS, 2021).



**Gambar 1.2 Persentase Masyarakat Miskin Pulau Sumatera
2020-2021**

Sumber: BPS Data diolah (2022)

Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa Aceh menjadi daerah dengan tingkat kemiskinan paling tinggi di Pulau Sumatera kemudian disusul oleh Bengkulu yang persentase penduduk miskinnya 15,22%, Sumatera Selatan 12,48%, Lampung 12,76%, Sumatera Utara 9,01%, Jambi 8,09%, Riau 7,04%, Bangka Belitung 4,90% dan Kepulauan Riau 4,72% (BPS, 2021). Hal ini mengisyaratkan Aceh masih belum mampu mengalokasikan dana Otsus yang diberikan oleh pemerintah pusat secara memadai, sehingga keberadaan dana otsus dinilai belum mampu mensejahterakan masyarakat Aceh secara signifikan (Ramzil *et al.*, 2020).

Kemiskinan tidak hanya mencerminkan ketidakmampuan, namun juga menggambarkan suatu proses yang kompleks dengan multidimensi. Jika

dibiarkan menjadi masalah akut, kemiskinan dapat menjebak generasi penerus (Desai *et al.*, 2003). Untuk mengatasinya permasalahan diperlukan penanganan secara komprehensif dan berkelanjutan serta tentu tidak mungkin dapat diatasi oleh pemerintah sendiri. Kemiskinan memerlukan penanganan secara komprehensif agar berhasil dalam menyelesaikannya. Kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta sangat diperlukan untuk menangani masalah multidimensional tersebut (Mustaqimah *et al.*, 2017).

Fakta di atas menunjukkan bahwa politik merupakan unsur yang paling dominan mempengaruhi lahirnya masyarakat miskin baru sebagai akibat dari berbagai kebijakan. Selain itu, meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia menyebabkan lemahnya faktor kesehatan dan pendidikan serta terbatasnya infrastruktur. Sekalipun memiliki sumber daya alam yang melimpah, akan tetapi tinggal di daerah terbelakang dengan infrastruktur terbatas, individu tersebut kemungkinan besar akan terjebak dalam lingkaran kemiskinan. (Tinambunan *et al.*, 2019).

DOKA belum terlaksana dengan baik, belum tepat sasaran dan sangat didominasi oleh provinsi. Hal ini dibuktikan dengan inkonsistensi Qanun Aceh yang memuat tentang Dana Otonomi Khusus. Hal itu berdampak pada pelaksanaan anggaran, terutama dalam mengurangi kemiskinan di Aceh. Pemerintah Aceh belum dapat mengoptimalkan pemanfaatan DOKA karena perencanaan tidak mengacu pada rencana induk dan bersifat ditetapkan dengan peraturan gubernur (sebagai acuan dalam perencanaan penggunaan dana otonomi)(Sari *et al.*, 2020).

Dana Otonomi Khusus dianggap mampu menurunkan angka kemiskinan apabila didukung oleh regulasi pemerintah yang baik. Hadirnya DOKA akan meningkatkan pemerataan sosial ekonomi karena pemerintah daerah lebih dekat dengan masyarakat daripada pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah diharapkan mendapatkan informasi dan menyelesaikan masalah lebih cepat (Ramzil *et al.*, 2020). Hal ini sejalan dengan penelitian Abrar (2018) yang menunjukkan bahwa DOKA dapat mendukung kegiatan untuk memberikan pengaruh yang signifikan dan meningkat pertumbuhan ekonomi, pengurangan angka kemiskinan, peningkatan IPM melalui investasi dan belanja daerah.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disarikan bahwa dalam jangka panjang implementasi desentralisasi khususnya daerah otonomi belum dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara signifikan. Terlihat dari tingkat kemiskinan yang masih tinggi, disparitas pembangunan antar wilayah terutama kesenjangan hasil pembangunan, ekonomi dan infrastruktur masih menjadi masalah serius (Utomo & Sumarsono, 2009). Hal ini disebabkan oleh pengelolaan DOKA yang belum sesuai sasaran, baik dari sisi politik maupun ekonomi. Dalam bidang ekonomi, DOKA tidak dialokasikan secara efektif membuat kesejahteraan masyarakat Aceh secara umum belum mengalami perbaikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Widodo (2019) juga mencoba mengevaluasi penggunaan dana otonomi khusus Papua dan Aceh tahun 2011-2017. Pada penelitian itu menggunakan fungsi layanan pendidikan, kesehatan,

infrastruktur layanan publik. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa DOKA berpengaruh terhadap efisiensi belanja pelayanan umum dan publik lainnya. Safwadi (2020) juga mengukur dampak Dana Otsus terhadap konvergensi IPM di Aceh yang menjelaskan bahwa DOKA yang berlimpah ternyata belum mampu secara signifikan mendorong pemerataan pembangunan manusia di Aceh.

Berdasarkan pemaparan di atas, menjadi dasar bagi peneliti untuk melakukan penelitian mengenai efektivitas penggunaan dana otonomi khusus Aceh. Selain itu peneliti juga menambahkan fungsi pemberdayaan ekonomi rakyat, yang merupakan *novelty* penting penelitian ini. Sehingga Peneliti bermaksud melakukan penelitian yang berjudul “Efisiensi Penggunaan Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh Periode 2018-2021”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi permasalahan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana efisiensi penggunaan Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh periode 2018-2021?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin didapat pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan efisiensi penggunaan Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh periode 2018-2021

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademisi

Temuan pada penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi tambahan bagi pembaca yang dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. Selain itu, diharapkan dapat dijadikan acuan bagi pihak-pihak yang membutuhkan, khususnya mengenai pengalokasian dan perkembangan dalam bidang otonomi khusus.

b. Manfaat Praktisi

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pedoman kebijakan baru bagi pengembangan penggunaan dana otonomi khusus sehingga mampu tercapainya kesejahteraan masyarakat yang lebih baik melalui penetapan kebijakan dan berbagai strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh.

D. Sistematika Pembahasan

Tesis ini terdiri dari lima bab. Bab pertama adalah pengantar yang menjelaskan dasar-dasar untuk menentukan judul. Bab ini berisi latar belakang masalah, membahas fenomena yang relevan dengan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, dan struktur penulisan.

Bab kedua berisi tentang kerangka teori dan kerangka acuan penelitian berdasarkan kajian pustaka, referensi dan publikasi penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penggunaan dana otonomi khusus. Kemudian dilanjutkan dengan hipotesis sebagai asumsi tentatif dan kerangka berpikir untuk menjelaskan variabel yang diteliti.

Bab ketiga menjelaskan bagaimana penelitian dilakukan. Bab ini memberikan gambaran tentang metode penelitian meliputi jenis penelitian, populasi dan sample, sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis data yang digunakan.

Bab keempat berisi tentang gambaran umum topik penelitian dan hasil pengolahan data yang telah dilakukan serta implikasinya. Bab ini merupakan jawaban dari rumusan masalah

Bab kelima berisi tentang kesimpulan dari pembahasan bab-bab yang telah diuraikan sebelumnya, hasil penelitian dan saran untuk berbagai pemangku kepentingan yang relevan bagi peneliti.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kebijakan desentralisasi fiskal seharusnya dapat mendorong peningkatan efisiensi pelayanan publik yang lebih baik. Pelayanan publik yang efisien dalam kerangka otonomi daerah seharusnya dapat mendorong kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk menguji dan menganalisis bagaimana Dana Otonomi Khusus dialokasikan periode 2018-2021.

Berdasarkan hasil analisis efisiensi Dari 23 kabupaten/kota yang diteliti menggunakan metode *Data Envelopment Analysis* hanya 1 Kota yang sudah efisien yaitu Kota Subulussalam dalam mengalokasikan DOKA dalam kurun waktu 4 tahun berturut-turut. Secara umum alokasi DOKA dinilai belum dialokasikan dengan baik oleh pemerintah daerah yang disebabkan oleh alokasi DOKA masih didominasi oleh sektor infrastruktur, serta masih terdapat permasalahan dalam pengalokasiannya.

B. Saran

1. Peneliti Selanjutnya

Mengingat bahwa ruang lingkup pada penelitian ini hanya dibatasi pada efektivitas dan efisiensi DOKA bidang infrastruktur, pendidikan, pemberdayaan ekonomi rakyat dan kesehatan terhadap kesejahteraan masyarakat. Keterbatasan penelitian menjadi bagi penelitian selanjutnya terutama untuk mengeksplorasi secara lebih mendalam

terutama pada bidang yang belum diteliti yaitu bidang sosial dan keistimewaan Aceh. Selain itu, juga dapat menganalisis secara komprehensif dampak DOKA terhadap kemiskinan di Aceh.

2. Pemerintah

Untuk meningkatkan efisiensi alokasi DOKA maka pemerintah kabupaten/kota wajib memenuhi *mandatory spending* anggaran infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pendidikan dan kesehatan pada setiap penyusunan APBD. Peran strategi DOKA perlu diawasi agar pemanfaatan DOKA lebih fokus dan terarah. Peningkatan sumber daya manusia yang mengelola DOKA perlu ditingkatkan agar tujuan tersebut bisa tercapai. Selain itu penguatan dan peningkatan tata Kelola DOKA perlu disinergikan dengan penguatan kelembagaan dan kewenangan Otonomi Khusus. Tentunya penguatan monitoring dan evaluasi dalam rangka meningkatkan akuntabilitas penggunaan DOKA.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. (2008). *Tafsir Ibnu Katsir*. Pustaka Imam Syafi'i.
- Abrar, M. (2018). *Dampak Dana Otonomi Khusus terhadap Kinerja Pembangunan Ekonomi di Provinsi Aceh*. institute Pertanian Bogor.
- Abrar, M., Juanda, B., Firdaus, M., & Hakimd, D. B. (2020). *Dampak Dana Otsus Terhadap Kemiskinan Pembangunan Manusia dan Pengangguran di Aceh*. 12(10), 713–734.
- Peraturan Gubernur Aceh Nomor 16 Tahun 2018: Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh 2017-2022, (2018).
- Amaroh, S. (2018). Penilaian Kinerja Sosial Berbasis Maqasid Syariah Pada Bank Umum Syariah Hasil Konversi Di Indonesia. *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, 2(1), 17–30. <https://doi.org/10.21043/malia.v2i1.4757>
- Arispen, A., & Dewi Rahmi. (2021). Pengaruh Dana Otonomi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh Tahun 2008-2020. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1), 75–81. <https://doi.org/10.29313/jrieb.v1i1.204>
- Arsyad, L. (2015). *Ekonomi Pembangunan*. STIM YKPN.
- Arsyad, L., & Stephanus Eri Kusuma. (2014). *Ekonomika Industri*. STIM YKPN.
- Aziz, N. L. L., Zuhro, R. S., Cahyono, H., Suryani, D., Aulia, D., Maulana, Y., & Tryatmoko, M. W. (2019). *Politik Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Dan Istimewa* (N. latifah L. Aziz (ed.)). Pusat Penelitian Politik (P2 Politik), Lembaga Ilmu Pengetahuan (LIPI).
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2017). *Indikator Kemiskinan*.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2021). *Indikator Kesejahteraan Rakyat*.
- Badan Pusat Statistik, B. (2012). *Perkembangan Beberapa Indikato Utama Sosial Ekonomi Indonesia*.
- Banker, R. D., Charnes, A., & Cooper, W. W. (1984). Some models for estimating technical and scale inefficiencies in data envelopment analysis. *Management Science*, 1078–1092.
- BAPPEDA. (2017). *Kajian Pemanfaatan Dana Otsus Kota Lhokseumawe*. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- Bappeda Aceh Barat. (2016). *No Title*.
- Beik, I. S. (2016). Islamisasi Ilmu Ekonomi. *Jurnal Ekonomi Islam*, 7(2), 186.
- Ben, A. (2003). *Teori Sosial Kritis*. Kreasi Wacana.
- Bird, R. M., & Vaillancourt, F. (1998). *Desentralisasi fiskal di negara-negara berkembang* (U. Almizan (ed.)). Gramedia Pustaka Utama.
- BPJS Kesehatan. (2022). *Evaluasi Pelaksanaan JKN, BPJS Kesehatan Minta Masukan Pemprov Aceh*. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. <https://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/post/read/2022/2412/Evaluasi-Pelaksanaan-JKN-BPJS-Kesehatan-Minta-Masukan-Pemprov-Aceh>
- BPK. (2020). *Penyerahan LPH Atas keuangan dan Kinerja Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur dari Dana otonomi Khusus TA 2019 Pada pemerintah Aceh*.
- BPS. (2021). Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota. In *Badan Pusat Statistik*.

- BPS Aceh. (2022). *Provinsi Aceh Dalam Angka 2022*.
<https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>
- Budiratna, H., & Qibthiyah, R. M. (2020). Evaluasi Atas Transfer Dana Otonomi Khusus Di Aceh, Papua dan Papua Barat. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 1(5), 1–13.
- Capra, M. U. (2000). *Islam dan Pembangunan Ekonomi* (I. A. Basri (ed.)). Gema Insani Pers.
- Charnes, A., Cooper, W. W., & Rhodes, E. (1978). Measuring the efficiency of decision making units. *European Journal of Operational Research*, 2, 429–444.
- Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Daerah Di Indonesia. *Law Reform*, 15(1), 149.
<https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23360>
- Coelli, T. J., Rao, D. S. P., C, C. J. O., & Battese, G. E. (2005). *An Introduction Analysis, Efficiency and Productivity*. Springer.
- Darmawan, I. G. W. (2022). Special Autonomy Implementation and Its Impact on the Welfare of the Society. *Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies*, 2(1), 17–2(September 2021), 17–29.
- Desai, R. M., Freinkman, L. M., & Goldberg, I. (2003). Fiscal Federalism and Regional Growth: Evidence from the Russian Federation in the 1990s. In *World Bank Policy Research Working Papers*. <https://doi.org/10.1596/1813-9450-3138>
- Dinas Pendidikan Aceh. (2021). *LA KIP 2021*.
- Effendi, H., Dahlawi, Ubaidullah, Novita, S., Nofriadi, & Helmi. (2020). The optimization management of special autonomy funds for acehnese people welfare. *International Journal of Criminology and Sociology*, 9, 782–789.
<https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.73>
- Fajar, M. A. (2020). Pengaruh Belanja Pendidikan , Belanja Kesehatan Dan Belanja Perumahan Dan Fasilitas Umum Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur) The Influence Of Education Expenditure , Health Expenditure And Housing A. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(1), 108–118.
- Fasa, M. I. (2017). Reformasi Pemahaman Teori Maqasid Syariah (Analisis Pendekatan Sistem Jasser Audah). *HUNafa: Jurnal Studia Islamika*, 13(2), 218. <https://doi.org/10.24239/jsi.v13i2.438.218-246>
- Fauzi, H. (2012). *Pembangunan Hutan Berbasis Kehutanan Sosial*. Karya Putra Darwati.
- Grigg, N. (1998). *Infrastructure Engineering and Management*. John Wiley & Son.
- Grigg, N., & Fontane, D. G. (2000). *No TitlInfrastructure System Management & Optimazation Internasional Civil Engineering*. Departement Diponegoro University.
- Herlina, S., Darwanis, & Abdullah, S. (2020). The Effect of Local Tax and Retribution on Direct Expenditure with Special Autonomy Fund as a Moderation In Districts / Cities of Aceh Province , Indonesia. *IAR Journal of Business Management*, 1(3), 186–190.
- Hidayat, F. (2022). Political Oversight and Intervention in the Policy for the

- Allocation of the Special Autonomy Fund for Aceh. *Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies*, 2(February), 117–129.
- Ikhsan, Hajad, V., Marefanda, N., Saputra, A., & Herizal. (2022). The Special Autonomy Funds are not for Poverty Alleviation: A Lesson From Aceh, s Way. *Journal of Local Governments Issues (LOGOS)*, 5(2), 161–175.
- IMP, R., & Handayani, D. R. (2018). Pengaruh Investasi Infrastruktur Jalan, Air dan Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah Tahun 2011-2015. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi (JEBA)*, 20(03), 1–13.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus, Menteri Keuangan Republik Indonesia (2019). www.jdih.kemenkeu.go.id
- Iskandar, A. (2021). Desentralisasi Dan Efisiensi Belanja Fungsi Pendidikan Serta Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Propinsi Sulawesi Selatan. *Info Artha*, 5(1), 11–24. <https://doi.org/10.31092/jia.v5i2.1139>
- Jalil, H., Yani, T. A., & Kurniawan, A. (2019). Optimization of special autonomy funds allocation to alleviate poverty in Aceh (a case study in districts/cities). *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 9(4), 93–108.
- Jonsa, A., & Suharmi, I. (2019). Peran Pemerintah Kabupaten Simeulue Dalam Pemberdayaan Air Bersih Dan Sanitasi Guna Mendorong Pengembangan Kapasitas Daerah Serta Penyediaan Pelayanan Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan Untuk Memenuhi Target Universal Acces 100% Mdgs Program Tingkat Nasi. *Jurnal Public Policy*, 4(2), 158–169. <https://doi.org/10.35308/jpp.v4i2.1047>
- Jumadi, P., G, M. M., & M, K. (2013). The Impact of Fiscal Decentralization on Local Economic Development in East Java, , Vol 13, Hal 01-07. *IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)*, 13(1), 1–7.
- Kemendikbud. (2022). *Neraca Pendidikan Daerah 2021*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi. <https://npd.kemdikbud.go.id/>
- Khaldun, I. (2003). *Mukaddimah*. Dar Al-Kitab Al Arabi.
- Khusaini, M. (2016). *Ekonomi Publik: Desentralisasi Fiskal Dan Pembangunan Daerah*. Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya.
- Kodoatie, R. J. (2003). *Manajemen dan Rekayasa Infrastruktur*. Pustaka Pelajar.
- Lasminingsih. (2004). *Ekonomi Pembangunan dan Keuangan Daerah*. Agro Media Pustaka.
- Maddaremmeng. (2021). Evaluasi Pengelolaan Dana Otsus Provinsi Aceh. *Evaluasi Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Aceh*.
- Martinaz, V. J., & McNab, R. M. (2001). *Fiscal Desentralization and Economic Growth*, (No. 01).
- Martini, R., Widyastuti, E., Hartati, S., Zulkifli, Mayasari, R., & Mardhiah. (2021). Poverty in South Sumatra Province Is Viewed From Village Fund and Village Fund Allocation. *Atlantis Highlights in Social Sciences, Education and Humanities*, 1, 100–107. <https://doi.org/10.2991/ahsseh.k.210122.018>
- Maryasih, L., Mutia, E., & Rahmawaty. (2016). *Pengukuran Efesiensi Pengalihan PBB Sebagai Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Dengan Menggunakan Metode Data Envelopment Analysis (DEA)*. February 2015, 0–

16.

- MaTa. (2020). *Anggaran Program Jaminan Kesehatan Aceh Membengkak Jadi Rp 1,047 Triliun*. Masyarakat Transparasi Aceh. <https://mataaceh.org/anggaran-program-jaminan-kesehatan-aceh/>
- Maulana, J., Purnama, E., & Syabandir, M. (2018). Perimbangan Dana Otonomi Khusus Aceh Antara Provinsi dan Kabupaten/Kota. *Syiah Kuala Law Journal*, 2(1), 18–38. <https://doi.org/10.24815/sklj.v2i1.10574>
- Mediyanti, S. (2019a). Analisis Dampak Realisasi Dana Otonomi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 7(1), 56–60.
- Mediyanti, S. (2019b). Analisis Dampak Realisasi Dana Otonomi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 7(1), 56–60. <http://journals.synthesispublication.org/index.php/ilmam>
- Menteri Keuangan. (2021). *Alokasi Dana Otonomi Khusus Aceh*.
- Mubyanto. (2000). *Membangun Sistem Ekonomi*. BPFY Yogyakarta.
- Mustaqimah, K., Hartoyo, S., & Fahmi, I. (2017). Peran Belanja Modal Pemerintah Dan Investasi Pembangunan Manusia Dalam Mengurangi Tingkat Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 6(2), 1–15. <https://doi.org/10.29244/jekp.6.2.2017.1-15>
- Nasikun. (1996). *Urbanisasi dan kemiskinan di Dunia Ketiga*. PT Tiara Wacana.
- Notoatmodjo, S. (2012). *Pendidikan dan perilaku kesehatan*. Rineka Cipta.
- Pemerintah Aceh. (2022). *Laporan Keuangan tahun 2021 (Audited)*.
- Qanun tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus, Pub. L. No. Lembaran Aceh No.7/201 (2018).
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam Universitas Indonesia (P3EI). (2012). *Ekonomi Islam*. Rajawali Pers.
- Putra, N. (2021). *Gampong Versus Kemiskinan*. Bappeda Pidie. <http://bappeda.pidiekab.go.id/berita/kategori/opini/gampong-versus-kemiskinan>
- Qoyum, A., & Prasajo, P. (2020). Rencana Pembangunan Jangka Panjang (Rpjpp), Sustainable Development Goals (Sdgs) and Maqasid Al-Shariah: the Case of Kabupaten Rembang. *Journal of Islamic Economics and Philanthropy*, 3(03), 833–854. <https://doi.org/10.21111/jiep.v3i03.4802>
- Ramzani, I. (2020). Model Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Aceh Ditinjau dari Maqasid Syariah. *Ar-Raniry, International Journal of Islamic Studies*, 7(2), 70–90.
- Ramzil, I., Yusuf, M. Y., & Fueqani, H. (2020). Model Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Aceh (Ditinjau dari Maqasid Syariah). *Journal of Sharia Economics*, 1(1), 58–81.
- Redaksi. (2021). *Apa Kabar Dana Otsus Aceh?* Waspada Aceh.Com.
- Reza, M. (2021). *Sudah Akhir Tahun, Puluhan Miliar Proyek di Bireuen Tak Kunjung Selesai*. Lintas Nasional. <https://www.lintasnasional.com/sudah-akhir-tahun-puluhan-miliar-proyek-di-bireuen-tak-kunjung-selesai/>
- Safwadi, I. (2018). *Transfer Fiskal Dana Otonomi Khusus, Konvergensi dan Pembangunan Manusia*. Syiah Kuala University Press.

- Safwadi, I. (2020). The Impact of the Special Autonom Fund on the Convergence of Human Development Index in Aceh. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 8(1), 179–200.
- Sanur, D. (2020). Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus di Aceh [Implementation of Special Autonomy Policies In Aceh]. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 11(1), 65–83. <https://doi.org/10.22212/jp.v11i1.1580>
- Saragih, J. P. (2003). *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Ghalia Indonesia.
- Sari, C. M. A., Ghifari, M. S., & Talib, K. A. (2020). Transactional Political Practices in the Asymmetric Decentralization System in Aceh (10-Year Analysis of Special Autonomy Fund Management Period 2008-2018). *Humanities & Social Sciences Reviews*, 8(3), 1443–1453. <https://doi.org/10.18510/hssr.2020.83145>
- Sedarmayanti. (2012). *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Banjar Maju.
- Sinaga, S., Irsad, & Rahmanta. (2021). Analysis of the Effect of Investment, Labor Force and Infrastructure on Economic Growth in North Sumatra Province. *International Journal of Research and Review*, 8(10), 184–195. <https://doi.org/10.52403/ijrr.20211023>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta.
- Suharnoi. (2021). Aceh ' s special autonomy in the perspective of asymmetric decentralization policies. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 18(2), 276–285.
- Suharyo. (2016). Otonomi Khusus Papua dan Aceh sebagai Perwujudan Implementasi Peranan Hukum dan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Rechstvinding (Media Pembinaan Hukum Nasional)*, 5(3), 323–337.
- Sujatmoko, E. (2010). Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan. *Jurnal Konstitusi*, 7(1).
- Sumodiningrat, G. (1998). *Membangun Perekonomian Rakyat*. Pustaka Pelajar.
- Sunaryati, S. (2016). Impact of Health Insurance on Saving and Consumption Expenses in Indonesia (Evidence From Indonesian Family Life Survey). *Eko-Regional: Jurnal Pembangunan Ekonomi Wilayah*, 2(2), 121–126.
- Tinambunan, E. V., Findi, M., & Purnamadewi, Y. L. (2019). Dampak Pembangunan Infrastruktur dalam Mendorong Pertumbuhan untuk Mengurangi Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2013 – 2017. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 8(1), 20–42. <https://doi.org/10.29244/jekp.v8i1.29447>
- TKPK Aceh Jaya. (2021). Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten Aceh Jaya. In *Bappeda Aceh Jaya* (Vol. 5, Issue 3).
- Todaro, M. P. (2011). *Ekonomi Pembangunan* (11th ed.). Erlangga.
- Todaru, M. P., & Smith, S. C. (2014). *Economic Developmen* (12th ed.). Amerika Serikat.
- Todaru, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic Development*. Pearson.

- Utomo, S. H., & Sumarsono, H. (2009). Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal terhadap Efisiensi Sektor Publik dan Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 1(2), 1–10.
- WHO. (2009). *Buku Saku Pelayanan Kesehatan Anak Di Rumah Sakit. Pedoman Bagi Rumah Sakit Rujukan Tingkat Pertama Di Kabupaten/Kota* (World Health Organization (ed.)). Country Office for Indonesia.
- Widodo, B. T. (2019). Evaluasi Dinamis Dampak Fiskal Otonomi Khusus terhadap Efisiensi Layanan Publik Dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Papua, Papua Barat dan Aceh Tahun 2011-2017. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 3(1), 31–53. <https://doi.org/10.31685/kek.v3i1.463>
- Wiley. (2017). *Metodelogi Penelitian untuk Bisnis: pendekatan pengembangan keahlian*. Salemba Empat.
- world bank. (2001). Decentralization and governance: does decentralization improve public service delivery? In *World Bank*.
- Yassirli, & Syahnur, S. (2018). Pengaruh Dana Otsus Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Aceh. *Jurnal Ilmah Mahasiswa (JIM) Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Unsyah*, 3(4), 495–505.
- Yuliantri, Fahmi, K., Amsari, F., & Kabullah, M. I. (2019). *Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Dana Otonomi Khusus Provinsi Nangroe Aceh Darussalam Berdasarkan Prinsip Desentralisasi Asimetris*. Andalas.
- Yusuf, M. Z., Wibowo, M. G., Hidayati, N., & Khusniati, N. (2020). Pengaruh Pendidikan dan IPM terhadap pertumbuhan ekonomi di Daerah Istimewa Ypgyakarta. *Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan*, 19(1), 25–38.
- Zaki, U. (2015). Refleksi memorandum of understanding (MoU) Helsinki dalam kaitan makna otonomi khusus di Aceh. *Jurnal Konstitusi*, 11(2), 371–392.